

Pendampingan Peningkatan Mutu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kabupaten Malaka

Gallex Simbolon^{*1}, Ambara S Mardani¹, Erni Raster Klau¹, Samrid Neonufa¹, Mariana Ikun R.D Pareira¹, Margaretha Maya¹, Angelina Martha Makin¹

¹Universitas Nusa Cendana
e-mail: *1gallex@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi PKBM di Kabupaten Malaka yaitu kurangnya kemampuan PKBM untuk mengembangkan program-program Pendidikan Luar Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan setempat, dan hampir seluruh PKBM hanya melaksanakan program-program pembelajaran yang ditawarkan oleh pemerintah, Beberapa pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah yang telah disediakan jarang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya mengakibatkan munculnya permasalahan dalam pelaksanaan program jangka panjang, Tingkat pencapaian mutu minimal penyelenggaraan PKBM belum tercapai baik pada kegiatan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, pemberian layanan informasi, perluasan jaringan kerjasama, maupun pada kegiatan pembinaan tenaga kependidikan dan tutor. Tujuan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam mempersiapkan di lembaga PKBM untuk ikut ambil bagian dalam proses akreditasi di tahun 2024, khususnya di Kabupaten Malaka. Kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Malaka akan diselenggarakan dalam tiga sesi yang terdiri atas sesi materi dan sesi praktek dengan pemateri yang berasal dari akademi dan praktisi, serta didampingi oleh fasilitator pada sesi praktek. Tiga sesi tersebut terdiri atas (1) Identifikasi, Assesmen Permasalahan dan Dasar Pengelolaan Lembaga; (2) Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga PKBM berdasarkan Ketentuan BAN-PDM, (3) Praktek Pemenuhan Dokumen dan Pengisian Aplikasi SISPENA BAN-PDM. Hasilnya Pengelola PKBM dapat menjalankan tugas pengelolaan sesuai dengan standar-standar pengelolaan PKBM yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan. PKBM yang berada di Kabupaten Malaka dapat menjalankan perencanaan, pengelolaan, pembelajaran dan program-program berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan PERMENDIKNAS Nomor 49 Tahun 2007 dan DAPODIK. PKBM dapat langsung membuat pengajuan untuk mendapatkan akreditasi dari BAN-PDM.

Kata kunci: pendampingan, mutu layanan, PKBM, Malaka

ABSTRACT

The problems faced by PKBM in Malaka Regency are the lack of PKBM's ability to develop Out-of-School Education programs that are in accordance with local needs, and almost all PKBM only implement learning programs offered by the government, Several guidelines for organizing and implementing Out-of-School Education programs that have been provided are rarely implemented as they should be, resulting in problems in the implementation of long-term programs, The minimum level of quality achievement for PKBM implementation has not been achieved either in the implementation of education and learning programs, provision of information services, expansion of cooperation networks, or in the development of education personnel and tutors. The purpose of this assistance is expected to be a solution in responding to the problems encountered in preparing PKBM institutions to take part in the accreditation process in 2024, especially in Malaka Regency. The assistance activity to improve the quality of Community Learning Activity Center (PKBM) institutions in Malaka Regency will be held in three sessions consisting of material sessions and practical sessions with speakers from academies and practitioners, and accompanied by facilitators in the practical sessions. The three

sessions consist of (1) Identification, Problem Assessment and Basic Management of Institutions; (2) Technical Instructions for Accreditation of PKBM Institutions based on BAN-PDM Provisions; (3) Practice of Document Fulfillment and Completion of SISPENA BAN-PDM Applications. The result is that PKBM Managers can carry out management tasks in accordance with PKBM management standards listed in the established National Education Standards. PKBM in Malaka Regency can carry out planning, management, learning and community-based programs in accordance with the provisions of PERMENDIKNAS Number 49 of 2007 and DAPODIK. PKBM can directly submit an application to obtain accreditation from BAN-PDM.

Keywords: mentoring, service quality, PKBM, Malaka

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk Satuan Pendidikan Non Formal yang termasuk dalam ranah kajian pengembangan dan implementasi pendidikan non formal yang paling kongkrit di masyarakat. Pentingnya pertumbuhan PKBM di masyarakat tidak terlepas dari upaya pemenuhan *basic needs* atau kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses pendidikan. Dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, PKBM berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adanya PKBM di tengah kehidupan masyarakat menjadi sentra kegiatan pemberdayaan potensi sumber daya yang ada sehingga proses pembangunan dapat dicapai. Kegiatan utama PKBM adalah membelajarkan masyarakat melalui berbagai layanan program pendidikan luar sekolah. Berdirinya PKBM diilhami oleh gagasan pusat belajar masyarakat (*community learning center*) yang terdapat di berbagai negara maju sejak sekitar tahun enam puluhan, serta adanya kebijakan tentang *broad based learning* (Hiryanto, 2009). UNESCO (1993) mendefinisikan PKBM sebagai tempat belajar yang terorganisir dimana orang-orang dapat belajar.

Dalam perkembangannya, PKBM juga berfungsi sebagai wadah penyedia informasi dan kegiatan belajar sepanjang hayat yang mudah diakses oleh masyarakat. Sihombing (1999) menyebutkan setidaknya terdapat tiga tujuan utama PKBM yaitu (1) Memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya; (2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi; (3) Meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga mampu menjadi bagian terhadap pemecahan masalah. Kemendikbud (2012) menyebutkan beberapa program yang dikembangkan oleh PKBM terdiri dari beberapa jenis yaitu: (1) Pendidikan keaksaraan usaha mandiri; (2) Pendidikan keaksaraan dasar; (3) Program kesetaraan (PAKET ABC); (4) Pembelajaran kewirausahaan; (5) Pengembangan pembelajaran anak usia dini (kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis); (6) Tempat penitipan anak; dan (7) Pelatihan dan kursus keterampilan.

Upaya peningkatan kualitas PKBM bukan perkara yang mudah. Sejalan dengan tuntutan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) mensyaratkan sesuai Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal setidaknya PKBM yang beroperasi memiliki enam komponen pengelolaan sebagai berikut: (1) Pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan satuan; (2) Pengelolaan peserta didik; (3) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Pengelolaan lingkungan dan ekosistem satuan pendidikan; (5) Pengelolaan pemangku kepentingan/kemitraan; dan (6) Pengelolaan kalender pendidikan. Di satu sisi, hasil observasi yang dilaksanakan oleh tim pada mitra di Kabupaten Flores Timur ditemukan jika mayoritas PKBM belum terakreditasi karena menemui keterbatasan dalam pemenuhan komponen pengelolaan yang akhirnya berimbas pada pencapaian standar mutu minimal.

Selain persoalan keterbatasan pemenuhan komponen operasional, juga ditemukan adanya permasalahan operasional lainnya seperti: (1) Minimnya dukungan materiil untuk pembangunan sarana dan prasarana PKBM; (2) Kurang tersedianya sarana dan media informasi untuk penyampaian usul, saran dan kritik dari masyarakat; (3) Terbatasnya tenaga yang berlatar

belakang Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat yang memahami pengelolaan satuan dan tujuan pengembangan; (4) Sulitnya mendapatkan tenaga tutor yang memiliki latar belakang keahlian mata pelajaran; (5) Tidak meratanya usaha peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pengelola; (6) Minimnya keberpihakan regulasi pemerintah terhadap keberlanjutan PKBM.

Beberapa masalah yang ditemukan ini menambah daftar panjang urgensi proses pendampingan terhadap lembaga yang komprehensif oleh akademisi, praktisi dan pengambil kebijakan untuk keberlangsungan pengelolaan PKBM sebagai ujung tombak pelaksana program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh mitra

PKBM di Kabupaten Malaka memiliki wilayah kerja meliputi 12 (Dua Belas) kecamatan jumlah PKBM terdata adalah 9 (sembilan) lembaga dengan rentang akreditasi B dan C di lembaga yang diterbitkan oleh BAN-PNF. Dari jumlah ini, artinya hanya 34 % dari jumlah keseluruhan PKBM di Kabupaten Malaka yang memenuhi syarat dasar pengelolaan lembaga PKBM aktif, sedangkan 66% lainnya berada pada kondisi sedang atau belum memenuhi sama sekali. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Nama PKBM Kabupaten Malaka

(Sumber: Dapodik, 2023)

No	PKBM	Lokasi	Status Akreditasi
1	PKBM NEKAF MESE	Kec. Kufeo	Belum akreditasi
2	PKBM Kapitan Jaya	Kec. Laenmaen	Belum terakreditasi
3	PKBM Ina Malaka	Kecamatan Malaka Barat	Akreditasi C
4	PKBM Rai Malaka	Kecamatan Malaka Barat	Belum akreditasi
5	PKBM Lurumutin	Kecamatan Malaka Tengah	Akreditasi B
6	PKBM Umarik Jaya	Kecamatan Malaka Tengah	Belum akreditasi
7	PKBM Berebein	Kecamatan Weliman	Belum akreditasi
8	PKBM Permata Bunda	Kecamatan Wewiku	Akreditasi B
9	PKBM Terate	Kecamatan Wewiku	Belum akreditasi

Selain ditemukannya persoalan dalam memenuhi komponen pengelolaan dan operasional, dalam pendalaman observasi oleh tim juga ditemukan sejumlah permasalahan internal yang dihadapi oleh PKBM yang berada pada wilayah kerja Kab. Malaka ditinjau dari tingkat pencapaian standar mutu minimal yang perlu dicapai, antara lain: (1) Kurangnya kemampuan PKBM untuk mengembangkan program-program Pendidikan Luar Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan setempat, dan hampir seluruh PKBM hanya melaksanakan program-program pembelajaran yang ditawarkan oleh pemerintah; (2) Beberapa pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah yang telah disediakan jarang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya mengakibatkan munculnya permasalahan dalam pelaksanaan program jangka panjang; (3) Tingkat pencapaian mutu minimal penyelenggaraan PKBM belum tercapai baik pada kegiatan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, pemberian layanan informasi, perluasan jaringan kerjasama, maupun pada kegiatan pembinaan tenaga kependidikan dan tutor.

Selain permasalahan-permasalahan yang dihadapi, PKBM juga menghadapi tantangan agar PKBM ke depan lebih berfungsi dalam melaksanakan program-program Pendidikan Luar Sekolah dan pemberdayaan yang berasal dari internal maupun eksternal yang harus dipertimbangkan dan dicari pemecahannya dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja PKBM. Secara internal PKBM menghadapi tantangan berupa keterbatasan kemampuan sumber daya pengelola PKBM untuk mengembangkan PKBM sebagai satuan Pendidikan Luar Sekolah yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, geografis, latar belakang sosial dan ekonomi, yang berakibat PKBM menghadapi kendala dalam menghasilkan berbagai program Pendidikan Luar Sekolah yang terencana, berkualitas, mandiri, dan kontekstual.

Berdasarkan analisa situasi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh mitra PKBM di atas, maka tim menilai sangat perlu diadakan kegiatan pendampingan sebagai salah satu upaya peningkatan standar mutu operasional dan pengelolaan satuan PNF yang komprehensif oleh *stakeholders* terkait seperti akademisi Pendidikan Luar Sekolah, praktisi pendidikan dan pemerintah sebagai pihak penyusun kebijakan. Pendampingan yang dimaksudkan juga mengacu pada implementasi berkelanjutan terutama untuk mempersiapkan PKBM dalam memperoleh akreditasi dari BAN-PNF.

C. Solusi Permasalahan

1. Hasil Assesmen Lanjutan

Program Kemitraan Masyarakat akan menyelenggarakan kegiatan pendampingan sebagai sebuah upaya mendasar dalam peningkatan mutu lembaga. Salah satu indikator utama dalam penilaian mutu lembaga adalah pengakuan status akreditasi lembaga PKBM sebagai satuan pendidikan non formal oleh Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal atau BAN-PNF. Melalui assesmen lanjutan kepada lembaga mitra, ditemukan tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga PKBM di daerah Kabupaten Malaka yaitu sulitnya pemenuhan dokumen persyaratan akreditasi yang disebabkan oleh faktor minimnya informasi teknis tentang pemenuhan dan pengajuan dokumen akreditasi sehingga menyebabkan lembaga PKBM di Kabupaten Malaka belum terakreditasi.

Dari 9 (sembilan) lembaga PKBM yang belum terakreditasi, terdapat 6 (enam) lembaga PKBM yang berstatus aktif dan masih beroperasi, sedangkan 3 (tiga) lainnya berstatus hiatus dan tidak lagi beroperasi disebabkan oleh beragam persoalan internal lembaga Data nama PKBM yang aktif dan belum terakreditasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Data Nama PKBM Kabupaten Malaka

(Sumber: Dapodik, 2023)

No	PKBM	Lokasi	Status Akreditasi
1	PKBM NEKAF MESE	Kec. Kufeo	Belum akreditasi
2	PKBM Kapitan Jaya	Kec. Laenmaen	Belum terakreditasi
3	PKBM Ina Malaka	Kecamatan Malaka Barat	Akreditasi C
4	PKBM Rai Malaka	Kecamatan Malaka Barat	Belum akreditasi
5	PKBM Lurumutin	Kecamatan Malaka Tengah	Akreditasi B
6	PKBM Umarik Jaya	Kecamatan Malaka Tengah	Belum akreditasi
7	PKBM Berebein	Kecamatan Weliman	Belum akreditasi
8	PKBM Permata Bunda	Kecamatan Wewiku	Akreditasi B
9	PKBM Terate	Kecamatan Wewiku	Belum akreditasi

Dengan demikian, 6 (enam) lembaga PKBM tersebut yang akan dilibatkan menjadi fokus sasaran dalam kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga. Secara khusus, sasaran peserta dalam kegiatan ini adalah pengelola, operator lembaga, tutor belajar dan fasilitator. Sasaran khusus ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan efisiensi kinerja dan peningkatan kapasitas tenaga di dalam lembaga PKBM.

2. Spesifikasi Kegiatan

Kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Malaka akan diselenggarakan dalam tiga sesi yang terdiri atas sesi materi dan sesi praktek dengan pemateri yang berasal dari akademi dan praktisi, serta didampingi oleh fasilitator pada sesi praktek. Tiga sesi tersebut terdiri atas (1) Identifikasi, Assesmen Permasalahan dan Dasar Pengelolaan Lembaga; (2) Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga PKBM berdasarkan Ketentuan BAN-PNF; (3) Praktek Pemenuhan Dokumen dan Pengisian Aplikasi SISPENA BAN-PNF.

Tabel 3. Spesifikasi Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM di Kabupaten Malaka

Materi Pendampingan	Model Pendampingan	Media	Output Pendampingan
Dasar pengelolaan PKBM	Presentasi Diskusi	In Focus	Peserta kegiatan mampu memahami standar pengelolaan lembaga berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Perencanaan Program PKBM kontekstual dan berkelanjutan	Presentasi Diskusi Praktek	In Focus	Peserta kegiatan memahami jenis-jenis program yang diselenggarakan oleh PKBM sesuai Permendiknas dan Dapodik
Akreditasi dan Instrumen PPA BAN-PNF	Presentasi Diskusi Praktek	In Focus	- Peserta memiliki persamaan persepsi tentang akreditasi. - Persiapan dokumen instrument. - Memahami sistematika unggah dokumen pada laman SISPENAI

METODE PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Malaka akan dilaksanakan sesuai rancangan kegiatan yang telah disusun pada tabel 4 (empat) di bawah ini:

Tabel 4. Rancangan Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM di Wilayah Kerja SPNF Kabupaten Flores Timur

No.	Tahapan	Materi/Kegiatan	Metode	Tempat
1.	Persiapan : a. Persiapan pelaksanaan kegiatan, administrasi surat menyurat, dll.	Mempersiapkan rancangan kerja, surat tugas, surat ijin melakukan kegiatan	Studi literatur	Hotel Cinta Damai Kabupaten Malaka
	b. Persiapan Media	Mempersiapkan LCD, Laptop, dll.	Penelusuran barang inventaris	Hotel Cinta Damai Kabupaten Malaka
	c. Persiapan Presentasi	Mempersiapkan dokumen PPT sebagai bagian dari pemaparan materi.	Studi literatur	Hotel Cinta Damai Kabupaten Malaka
1.	Pelaksanaan : Pembukaan Pelaksanaan	- Melakukan kegiatan - Menyusun program dan perangkat (dokumen penunjang)	Diskusi Ceramah Praktek Langsung	Hotel Cinta Damai Kabupaten Malaka

		- Melaksanakan Praktek menginput data di halaman SISPENA BAN-PDM		
2.	Evaluasi	Evaluasi	Diskusi	Hotel Cinta Damai Kabupaten Malaka

B. Materi yang disampaikan

Penyampaian materi meliputi 7 standar penilaian akreditasi yaitu:

1. Standar Isi yang terdiri atas:
 - a) Kurikulum meliputi:
 - 1) Acuan kurikulum
 - 2) Evaluasi kurikulum
 - b) Kompetensi yang dilihat yaitu Perilaku Keselamatan diri
2. Standar Proses yang meliputi:
 - a) Perencanaan Pembelajaran meliputi:
 - 1) Program semester (Prosem)
 - 2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)
 - 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
 - 4) Program Holistik Integratif (HI)
 - b) Keterlibatan orang tua yaitu dokumen bentuk keterlibatan orang tua pada Lembaga.
 - c) Pengawasan Pembelajaran yang difokuskan pada supervisi yang dilakukan oleh lembaga.
3. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a) Pendidik yang terdiri atas:
 - 1). Kualifikasi akademik;
 - 2). Kualifikasi kompetensi
 - b) Tenaga kependidikan yang terdiri atas:
 - 1). Kualifikasi akademik dan
 - 2). Kualifikasi kompetensi
4. Standar Sarana Prasarana yang meliputi:
 - a) Standar sarana yang terdiri atas:
 - 1) Ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE)
 - 2) Sarana Kebersihan
 - b) Standara prasarana yang terdiri atas:
 - 1) Luas Lahan lembaga
 - 2) Status lahan
 - 3) Jenis ruang dan
 - 4) Ketersediaan instalasi
5. Standar Pengelolaan yang meliputi:
 - a) Perencanaan yang terdiri atas:
 - 1) Visi, Misi dan Tujuan
 - 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - 3) Kalender Pendidikan
 - b) Pengorganisasian yang terdiri atas:
 - 1) Struktur Organisasi
 - 2) Deskripsi tugas pokok dan fungsi Pendidik dan tenaga kependidikan
 - c) Pelaksanaan yang terdiri atas:

- 1) Panduan pelaksanaan
- 2) Layanan menurut kelompok usia
- 3) Lama belajar perhari
- 4) Lama belajar perminggu
- 5) Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan (daftar hadir)
- d) Pengawasan yang meliputi supervisi satuan yang mengandung unsur-unsur tujuan, temuan, umpan balik dan tindak lanjut supervisi.
6. Standar Pembiayaan yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan pembiayaan dan
 - b) Administrasi keuangan
7. Standar Penilaian yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pelaporan.

HASIL KEGIATAN

Kemajuan pelaksanaan kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Malaka hingga pada tahap pelaporan ini diajukan telah berada pada koordinasi intensif bersama lembaga mitra. Telah dilaksanakan pula assesmen dan identifikasi permasalahan lanjutan untuk perbaruan data terkait permasalahan yang krusial dan PKBM sasaran yang dituju sebagai peserta.

Berdasarkan hasil koordinasi intensif bersama pihak lembaga mitra, disepakati bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juni 2024 berlokasi di Aula Hotel Cinta Damai Jl. Jenderal Sudirman, Kota Betun, Kabupaten Malaka. Peserta kegiatan yang akan dihadirkan berasal dari 4 (empat) PKBM aktif yang belum terakreditasi (sesuai dengan yang tertulis pada Tabel 2 pada Bab 2) yang terdiri atas pengelola PKBM, operator lembaga, tutor dan fasilitator. Pemateri utama terdiri atas unsur akademisi dan praktisi.



Hasil dari kegiatan ini sesuai dengan fokus utama kegiatan yaitu persiapan lembaga dalam menghadapi akreditasi dan berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, semua peserta perwakilan dari tiap-tiap lembaga sangat antusias mengikuti setiap sesi dan banyak hal baru yang ditemukan. Hal ini nampak ketika sesi diskusi dimulai ada banyak peserta yang bertanya sehingga sesi diskusi dibagi dalam 3 bagian. Respon yang baik juga terlihat dari beberapa pengelola lembaga PKBM yang hadir bahwa apa yang dipahami selama ini berkaitan dengan instrumen akreditasi ternyata salah diartikan. Pemaparan materi oleh narasumber diakui memberikan pemahaman yang baru pada para peserta, khususnya terkait dokumen-dokumen akreditasi yang selama ini disalahartikan. Pada sesi teknik mengunggah dokumen ke dalam Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) terdapat beberapa lembaga yang tidak membawa perangkat (laptop sehingga tidak terlibat secara aktif). Terdapat juga beberapa peserta yang sudah terbiasa dengan sistem tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan karena adanya “jabatan rangkap” sebagai tutor sekaligus sebagai operator lembaga. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memfasilitasi lembaga PKBM dalam meningkatkan mutu lembaga melalui keikutsertaan dalam proses akreditasi lembaga sesuai standard yang ditetapkan oleh BAN-PPN, sehingga di masa mendatang lembaga PKBM mampu menjadi satuan pendidikan non formal yang berkualitas dan bermutu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berpijak pada keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Malaka berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Peserta kegiatan pendampingan terlibat aktif selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam tiga sesi tanya jawab dan diskusi. Kegiatan pendampingan berkontribusi positif dalam menambah pengetahuan peserta, khususnya terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu diunggah pada Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, antara lain: Kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga PKBM seperti ini perlu dilakukan lagi secara intensif berkesinambungan karena minimnya perhatian terhadap pengembangan kapasitas lembaga PKBM di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Malaka perlu terus memfasilitasi lembaga PKBM yang ada di dalam wilayah kerja, khususnya terkait hal teknis pengisian dan pengunggahan dokumen-dokumen akreditasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Fokum PKBM Provinsi NTT dan semua Pengelola Lembaga PKBM di kabupaten Malaka dan DiNas Pendidikan Kabupaten Malaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, R., Wadin, W., & Pradikto, B. (2020). Analisis Kesiapan PKBM dalam Menghadapi Akreditasi Berbasis Sispna 2.0 di Kabupaten Rejang Lebong. *Journal Of Lifelong Learning*, 3(2), 88-99.
- Hasan, F., Fajarwati, L., & Imamyartha, D. Peningkatan Partisipasi Akreditasi melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 27(2), 170-174.
- Hiryanto, M. (2009). *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Makalah Pelatihan Pendidik PKBM Sejahtera Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kilpatrick, S. (2000). *Community learning and sustainability: Practice and policy*. Centre for Research and Learning in Regional Australia.

- Putera, H. R., Ats-Tsauri, M. I., & Ropandi, Y. (2022). Strategi Peningkatan Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM). *Jurnal Teknik Industri*, 3(02), 39-48.
- Reimers, F., & Tiburcio, L. (1993). *Education, Adjustment and Reconstruction: Options for Change. A UNESCO Policy Discussion Paper*. UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France.
- Sihombing, U. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah: Manajemen Strategi: Konsep, Kiat, dan Pelaksanaan*. PD. Mahkota.